

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PROGRAM MERDEKA BELAJAR KAMPUS MERDEKA DI FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS TADULAKO

Fira Juniar^{1)*}, Muzakir Tawil²⁾, Agusta Sri Astuti³⁾

¹ Prodi. Administrasi Publik Fisip, Universitas Tadulako
firajuniar5@gmail.com

² Prodi. Administrasi Publik Fisip, Universitas Tadulako
tawilmute@gmail.com

³ Prodi. Administrasi Publik Fisip, Universitas Tadulako
agustasriastuti@gmail.com

ABSTRAK

Pemerintah Republik Indonesia mengeluarkan kebijakan terkait program Mereka Belajar Kampus Merdeka yang diatur melalui Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. Dalam hal ini, kebijakan ini memuat tentang hak mahasiswa untuk melakukan pembelajaran diluar program studi dengan maksimal selama tiga semester dengan tujuan agar mahasiswa dapat memperoleh kesempatan untuk menambah wawasan, pengalaman, serta meningkatkan kompetensi sesuai minat, bakat serta cita-cita yang dimiliki. Adapun program ini diharapkan dapat menjadi jawaban atas tuntutan perkembangan zaman saat ini. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui sejauh mana kebijaknaini dilaksanakan. Metode deskriptif kualitatif digunakan pada penelitian ini, dimana analisis dilakukan terhadap data yang telah dikumpulkan baik yang bersumber dari dokumen, jurnal, observasi, wawancara yang kemudian dianalisis dan di deskripsikan secara sistematis sesuai dengan rumusan masalah yang ada, dianalisis dengan teori George C.Edward III dengan empat aspek yang terdiri dari komunikasi, sumberdaya, disposisi, dan struktur birokrasi. Adapun hasil penelitian yang diperoleh menunjukkan bahwa implementasi kebijakan program Merdeka Belajar Kampus Merdeka di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tadulako belum sepenuhnya berjalan dengan baik. Hal ini dikarenakan masih terdapat beberapa kendala dalam pengimplementasian kebijakan tersebut. Pihak pelaksana diharuskan meningkatkan konsistensi terhadap pelaksanaan 8 jenis kegiatan program MBKM, masih perlu dilakukan sejenis sosialisasi atau rapat koordinasi antar pihak pelaksana ditingkat fakultas melalui rapat monitoring dan juga evaluasi pelaksanaan kegiatan, belum tersedianya fasilitas pendukung seperti ruang MBKM FISIP, peningkatan kapasitas terkait pemahaman dosen-dosen di beberapa prodi. Kemudian, terkait sikap pelaksana dalam hal ini jika terdapat kegiatan program MBKM yang dirasa tidak relevansi dengan program studi asal maka perlu disediakan alternatif lain seperti mata kuliah yang berkaitan dengan program MBKM yang diikuti mahasiswa. Selanjutnya, pada struktur birokrasi walaupun pembagian struktur serta tanggung jawab telah terdistribusi dengan baik namun harus tetap dilakukan monitoring serta evaluasi pelaksanaan program MBKM di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tadulako.

Kata kunci: Implementasi, Kebijakan, Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka.

ABSTRACT

The Government of the Republic of Indonesia issued a policy related to the Independent Campus Learning Program which is regulated through Permendikbud Number 3 of 2020 concerning National Higher Education Standards. In this case, this policy contains the right of students to carry out learning outside the study program for a maximum of three semesters with the aim that students can get the opportunity to broaden their horizons, experience, and improve competencies according to their interests, talents and ideals. This program is expected to be the answer to the demands of the current times. The purpose of this study is to determine the extent to which this policy is implemented. Qualitative descriptive method is used in this research, where the analysis is carried out on the data that has been collected both from documents, journals, observations, interviews which are then analyzed and described systematically in accordance with the formulation of existing problems, analyzed by George C. Edward III's theory with four aspects consisting of communication, resources, disposition, and bureaucratic structure. The research results obtained show that the implementation of the Merdeka Learning Campus Merdeka program policy at the Faculty of Social and Political Sciences, Tadulako University has not gone well. This is because there are still several obstacles in implementing the policy. The implementing party is required to increase the consistency of towards the implementation of 8 types of MBKM program activities, it is still necessary to conduct a type of socialization or coordination meeting between the implementing parties at the faculty level through monitoring meetings and also evaluating the implementation of activities, the unavailability of supporting facilities such as the MBKM FISIP room, capacity building related to the understanding of lecturers in several study programs. Then, related to the attitude of the implementers in this case, if there are MBKM program activities that are deemed irrelevant to the original study program, it is necessary to provide other alternatives such as courses related to the MBKM program that students follow. Furthermore, in the bureaucratic structure, although the distribution of structures and responsibilities has been well distributed, monitoring and evaluation of the implementation of the MBKM program at the Faculty of Social and Political Sciences, Tadulako University must still be carried out.

Keyword: Implementation, Policy, the Independent Campus Learning Program.

Submisi: 09-07-2024

Diterima: 10-07-2024

Dipublikasikan: 30-08-2024

Pendidikan menjadi salah satu hal terpenting yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat. Di mana saat ini, perhatian terhadap pendidikan semakin meningkat dalam perkembangan individu dan masyarakat, terutama di Indonesia. Karena itu, upaya utama dalam mencapai tujuan memberikan pendidikan berkualitas tinggi adalah melalui kebijakan pendidikan yang efektif. Untuk memajukan bangsa, langkah awal adalah menjamin bahwa semua penduduk Indonesia mendapatkan hak pendidikan mereka (Viennet & Pon : 2017).

Pendidikan di Indonesia terus mengalami peningkatan seiring dengan berjalan perkembangan zaman. Saat ini, lembaga pendidikan tinggi perlu memiliki kemampuan untuk menciptakan dan melaksanakan metode pembelajaran yang kreatif dengan tujuan membantu mahasiswa mencapai pembelajaran yang komprehensif dan berkelanjutan.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang memberikan kerangka kerja untuk usaha meningkatkan pendidikan di Indonesia membuat tuntutan untuk meningkatkan pendidikan dari Sekolah Dasar hingga Perguruan Tinggi. Dengan demikian sering kali Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan mendorong untuk secara teratur menyusun kebijakan baru yang bertujuan meningkatkan kualitas proses Pendidikan (Sevima : 2022).

Penjaminan mutu Pendidikan dasar dan menengah adalah suatu mekanisme yang sistematis, terintegrasi, dan berkelanjutan untuk memastikan bahwa seluruh proses penyelenggaraan Pendidikan telah sesuai dengan standar mutu dan aturan nasional perguruan tinggi terutama dalam hal Standar Proses Pembelajaran yang memberikan hak kepada mahasiswa untuk memilih apakah mereka ingin menyelesaikan program studi mereka dan mencapai target pembelajaran yang telah ditetapkan oleh penyelenggara program studi atau hanya sebagian dari program studi tersebut. Sisanya, yang tidak melebihi 60 SKS dapat diambil diluar program studi mereka. Pendekatan pembelajaran ini bertujuan untuk mendorong kemandirian mahasiswa dengan memberikan kebebasan dalam memilih jalur pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan dan minat mahasiswa.

Oleh karena itu, salah satu terobosan yang dilakukan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) yaitu mengambil langkah dengan Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka sebagai tanggapan atas kebutuhan untuk mempersiapkan lulusan yang memiliki kompetensi dalam menghadapi perubahan yang signifikan dalam bidang sosial ,budaya, lapangan kerja, dan teknologi yang berkembang pesat di era revolusi industri 4.0. Oleh karena itu, peningkatan kompetensi mahasiswa perlu ditingkatkan seiring dengan perkembangan zaman. Tujuan dari program ini adalah untuk menciptakan keterkaitan dan integrasi antara lulusan perguruan tinggi dengan dunia usaha, industri, dan masa depan yang terus berubah dengan cepat.

Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi merupakan sarana yang tepat untuk mereduksi kesenjangan antara kompetensi mahasiswa dengan tantangan perkembangan zaman agar mahasiswa siap memasuki dunia kerja. Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka memberikan kewenangan penuh pada universitas melalui program studi mengembangkan kurikulum secara fleksibel supaya capaian pembelajaran mahasiswa menjadi unggul dan optimal dalam hal pengetahuan, sikap, dan keterampilan yang relevan dengan dunia usaha dan dunia industri (Nur Asiah: 2022).Namun, dalam penerapan kebijakan MBKM tentunya masih terdapat berbagai problematika dalam pelaksanaannya, mengingat program MBKM masih sangat baru sejak pertama dikeluarkan yaitu pada tahun 2020. Permasalahan umum dalam penerapan MBKM di

perguruan tinggi adalah terkait penyesuaian kurikulum perguruan tinggi dengan kurikulum MBKM

Selanjutnya, berdasarkan pengalaman yang dialami oleh mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik yang merupakan alumni program MBKM rasakan yaitu terkait sistem konversi SKS yang masih sulit dilakukan ketika mahasiswa selesai mengikuti program MBKM dimana seharusnya beban belajar untuk Bentuk Kegiatan Pelajaran (BKP) yang terintegrasi dalam program MBKM maksimal 20 sks per semester dan sisanya jika ada mata kuliah/sks yang belum terpenuhi dari kegiatan pembelajaran luar program studi dan luar perguruan tinggi, disiapkan alternatif mata kuliah daring pada program studi asal. Namun fakta yang ada di lapangan tidak semua program studi melakukan alternatif atau pilihan pembelajaran lainnya.

Namun, dalam hal ini berdasarkan fakta yang ditemukan dilapangan mengingat semua prodi memiliki kebijakan masing-masing terkait bagaimana cara pengkonversian nilai mahasiswa yang mengikuti program MBKM dan bahkan tak jarang ada dosen yang tidak ingin mengkonversi mata kuliah mahasiswa yang mengikuti program MBKM karena beberapa program MBKM seperti Kampus Mengajar dianggap tidak relevansi dengan program studi dari mahasiswa yang mengikuti program MBKM. Selain itu masih terdapat prodi yang kurang memberikan dukungan kepada mahasiswanya untuk mengikuti kegiatan MBKM, serta kurangnya partisipasi pihak pelaksana dalam mengikuti rapat atau sosialisasi yang diadakan oleh pihak pelaksana ditingkat fakultas.

Berdasarkan Peraturan Rektor Universitas Tadulako Nomor 8 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Merdeka Belajar Kampus Merdeka di Universitas Tadulako. Dalam keputusan tersebut, Universitas Tadulako memiliki tujuan untuk memberikan pengalaman konstektual kepada mahasiswa melalui pendekatan ini, diharapkan mahasiswa akan meningkatkan kompetensi mereka dengan cara yang terstruktur dan menyeluruh sehingga mereka siap untuk bekerja atau bahkan menciptakan lapangan kerja baru. Akan tetapi jika merujuk pada, peraturan Rektor Universitas Tadulako Nomor 8 Tahun 2020 dari 8 kegiatan program MBKM yang seharusnya dikembangkan di Universitas Tadulako. Akan tetapi, untuk Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik hanya massif melakukan 3 program saja dalam 4 tahun terakhir yaitu Pertukaran Mahasiswa Merdeka, Kampus Mengajar, Magang Studi Independen dan Bersertifikat. sedangkan, 5 program lainnya tetap disosialisasikan namun untuk minat mahasiswa mengikuti masih kurang.

Berdasarkan data yang di lapangan bahwa jumlah mahasiswa UNTAD yang mengikuti program MBKM *flagship* Kementerian dalam kegiatan Pertukaran Mahasiswa Merdeka tahun 2021 sebanyak 231 orang, tahun 2022 sebanyak 273 orang, tahun 2023 sebanyak 252 orang, dan tahun 2024 sebanyak 283 orang. Pada program Kampus Mengajar tahun 2021 sebanyak 391 orang, tahun 2022 sebanyak 368 orang, tahun 2023 sebanyak 574 , dan tahun 2024 sebanyak 517 orang. Yang terakhir pada program Magang Studi Independen Bersertifikat tahun 2021 sebanyak 23 orang, tahun 2022 sebanyak 239 orang, tahun 2023 sebanyak 295 orang, dan tahun 2024 sebanyak 155 mahasiswa. Berdasarkan data tersebut bahwa memang dalam pelaksanaannya hanya 3 program saja yang masih di lakukan di Universitas Tadulako.

Kemudian untuk Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik jika dilihat berdasarkan data dalam jumlah mahasiswa yang lolos program MBKM juga sangat sedikit hanya program studi ilmu komunikasi saja yang tiap tahunnya banyak mahasiswanya mengikuti program MBKM. Kurangnya partisipasi mahasiswa di FISIP UNTAD untuk mengikuti program MBKM ditiap tahunnya terdiri dari 3 program diantaranya yaitu program Pertukaran Mahasiswa Merdeka Tahun 2021 sebanyak 61 orang, Tahun 2022 sebanyak 51 orang, Tahun 2023 sebanyak 47 orang, dan Tahun 2024 sebanyak 33 orang. Kemudian, program Kampus Mengajar di Tahun 2021 sebanyak 3 orang, Tahun 2022 13

orang, Tahun 2023 40 orang, dan Tahun 2024 sebanyak 18 orang. Dan program terakhir yaitu Magang Studi Independen Bersertifikat pada Tahun 2021 sebanyak 2 orang, Tahun 2022 sebanyak 21 orang, Tahun 2023 sebanyak 21 orang, dan Tahun 2024 sebanyak 22 orang (Sumber: mbkm.untad.ac.id).

Sementara itu, sistem konversi ke mata kuliah yang diikuti di kampus sesungguhnya hanya untuk mengukur beban dan bukan kompetensi riil yang dimiliki mahasiswa terlebih lagi terdapat mata kuliah wajib yang harus mereka ikuti. Apabila kompetensi tidak sesuai dengan capaian belajar yang ada di tiap program studi maka tentunya tidak dapat dikonversi atau disetarakan dengan mata kuliah wajib. Selain itu, permasalahan yang masih di hadapi pihak fakultas yaitu mengenai sistem konversi tak jarang juga mahasiswa merasakan kebingungan dengan program Merdeka Belajar Kampus Merdeka seperti kurangnya informasi yang jelas dan juga ke siapan mahasiswa.

Dengan demikian, yang menjadi kunci keberhasilan dalam penerapan program Merdeka Belajar Kampus Merdeka bergantung pada bagaimana implementasi kebijakan yang dilaksanakan oleh perguruan tinggi yang mana dalam hal ini pihak perguruan tinggi harus mampu menyesuaikan dengan kurikulum secara adaptif, fleksibel, serta dapat berkolaborasi dengan pihak mitra terkait sesuai dengan bidang keilmuan yang ditawarkan. Sementara itu tujuan dari pelaksanaan program MBKM bagi Perguruan Tinggi ialah menyiapkan lulusan Perguruan Tinggi yang memiliki *soft skills* maupun *hard skills* yang matang dan relevan dengan kebutuhan zaman. Dengan begitu angka sarjana yang menganggur di Indonesia dapat berkurang.

Universitas Tadulako adalah satu perguruan tinggi di Indonesia yang turut aktif mendukung program-program Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Dalam penerapan program-program Merdeka Belajar Kampus Merdeka tentunya masih terdapat berbagai kendala yang dihadapi oleh Universitas Tadulako. Adapun dalam hal ini aktor utama penerapan kebijakan Merdeka Belajar Kampus Merdeka adalah mahasiswa dan dosen, namun terkait pengetahuan tentang apa isi kebijakan Merdeka Belajar Kampus Merdeka masih didominasi oleh dosen sementara yang menjadi sasaran dalam setiap program Merdeka Belajar Kampus Merdeka adalah mahasiswa karena dalam hal ini memiliki tujuan untuk mensinkronkan antara pendidikan dengan dunia kerja dan juga industri.

Berdasarkan informasi yang telah diperoleh, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tadulako akan menjadi subjek penelitian yang berkaitan dengan pelaksanaan Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana program tersebut telah dijalankan apakah telah sesuai dengan tujuan dan harapan atau sebaliknya.

METODE

Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu dengan menggunakan metode kualitatif dengan tujuan untuk menganalisis subjek penelitian dan dideskripsikan dengan kata-kata dan kalimat dengan menggunakan metode alamiah. Data-data yang diperoleh di lapangan terdiri atas kata-kata atau gambar melalui peneliti sendiri sebagai instrumen dalam penelitian ini. Adapun data yang dikumpulkan dengan melalui teknik observasi atau pengamatan, wawancara langsung dengan informan, studi dokumentasi dan penelusuran data secara *online*. Menurut Nazir (2011) metode deskriptif digunakan untuk membuat gambaran fakta dengan interpretasi yang tepat.

Dalam penelitian ini, metode deskriptif digunakan untuk menganalisis data, untuk menggambarkan atau mendeskripsikan data yang relevan dengan proses pelaksanaan program Merdeka Belajar Kampus Merdeka di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik sebagaimana adanya

tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum atau generalisasi. Dalam cara memperoleh data yang diperlukan, adapun dalam penelitian ini peneliti menggunakan dua jenis data yaitu data sekunder dan juga data primer.

Adapun dalam penelitian ini, peneliti merupakan instrumen kunci yang melakukan pengamatan secara langsung dokumen yang ada serta tingkah laku daripada manusia yang merupakan objek penelitian, melakukan wawancara secara mendalam, mencari data pendukung pada dokumentasi yang ada serta melalui internet seperti jurnal dan juga peraturan serta regulasi yang digunakan sebagai pendukung yang kemudian dideskripsikan secara mendetail dan jelas mengenai situasi pengamatan yang peneliti amati. Aan Komariah (2010) menyebutkan bahwa melalui teknik ini peneliti dapat memperoleh informasi yang akurat dalam mengelolah data untuk menjawab permasalahan dalam penelitian.

Kemudian, jumlah narasumber/informan pada penelitian ini berjumlah 7 orang yang dipilih secara *purposive* yang mana informan tersebut dipilih karena dianggap menguasai, memahami dan mengetahui sepenuhnya keterangan dan informasi tentang kebijakan Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Dalam hal ini, informan dalam penelitian ini terdiri dari Ketua Pusat Pengembangan Merdeka Belajar Kampus Merdeka UNTAD, Ketua MBKM FISII, Koordinator Program Studi Ilmu Komunikasi Tahun 2024, Koordinator Program Studi Tahun 2023, Mahasiswa Alumni Program MBKM kegiatan MSIB, Kampus Mengajar, dan juga Program Pertukaran Mahasiswa Merdeka.

Teknik Pengumpulan data yang dilakukan terdiri dari observasi, wawancara, dan juga dokumentasi. Dalam penelitian ini, peneliti melakukan wawancara secara mendalam dengan para informan berkaitan dengan topik penelitian yang dilakukan. Observasi merupakan suatu proses yang kompleks yang melibatkan banyak sekali proses mulai dari studi kepustakaan yaitu metode pengumpulan data yang meliputi analisis dokumen, informasi, arsip, dan juga sumber-sumber informasi pendukung lainnya dalam penelitian ini. Berdasarkan hal tersebut, peneliti akan melakukan pengamatan secara langsung di lapangan terkait dengan pelaksanaan program Merdeka Belajar Kampus Merdeka di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik di Unuversitas Tadulako. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan bantuan yang terdiri dari daftar pedoman wawancara, buku catatan, alat tulis, serta *smartphone* untuk memperoleh hasil rekaman wawancara dan juga dokumentasi bersama informan.

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu dengan model interaktif menurut Miles, Huberman, dan Saldana (2014) yang menyatakan bahwa analisis model interaktif terdiri atas yaitu pengumpulan data, kondensasi data (*data condensation*), penyajian data (*data display*), dan penarikan kesimpulan (*conclusions drawing*).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka merupakan salah satu inovasi yang dikeluarkan oleh Kemendikbudristek agar dapat menghasilkan lulusan yang siap menghadapi perubahan sosial, budaya, dunia kerja, dan kemajuan teknologi yang pesat. Berdasarkan Surat Keputusan Rektor Universitas Tadulako Nomor 8 Tentang Pelaksanaan Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka di Universitas Tadulako. Adapun tujuan dari peraturan ini yaitu dalam rangka menyiapkan lulusan perguruan tinggi yang memiliki *soft skills* dan *hard skills* yang matang dan relevan dengan kebutuhan zaman.

Untuk melihat sejauh mana implementasi kebijakan program Merdeka Belajar Kampus Merdeka di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tadulako, penulis menggunakan teori *direct and indirect impact on implementation* oleh George C. Edward III (Leo Agutsino, 2020) yang terdiri atas empat aspek diantaranya yaitu 1) Komunikasi 2) Sumberdaya 3) Disposisi 4) Struktur Birokrasi.

Adapun berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa dalam proses pelaksanaan Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tadulako belum sepenuhnya berjalan dengan baik. Hal ini bisa dilihat bahwa dalam sasaran dan tujuan kebijakan bahwa pemahaman implementor terkait program MBKM belum cukup baik dan untuk informan mahasiswa mereka menganggap bahwa masih perlu dilakukan sosialisasi yang massif tidak hanya kepada mahasiswa namun juga kepada dosen yang ada FISIP. Sehingga kedepannya pelaksanaannya dapat berjalan dengan baik dan juga sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.

Dalam aspek komunikasi belum berjalan dengan baik jika dilihat pada variabel konsistensi jika merujuk pada SK Rektor Universitas Tadulako Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Program Merdeka Belajar Kampus merdeka di Universitas Tadulako FISIP hanya melakukan 3 program saja yaitu program Pertukaran Mahasiswa Merdeka, Kampus Mengajar, dan juga Magang Studi Independen Bersertifikat. Namun, untuk proses sosialisasi sudah sangat baik dilakukan karena pihak pelaksana tidak hanya membuat sosialisasi ditingkat fakultas saja namun juga sosialisasi ditingkat prodi baik *offline* maupun *online*. Walaupun demikian, tetap harus dilakukan rapat koordinasi bersama dengan dosen-dosen di tingkat fakultas terhadap pemahaman mereka terutama terkait penggunaan *website SITAMPAN*.

Pada aspek sumber daya telah berjalan dengan baik. Hal ini dilihat berdasarkan pada pembagian kerja serta beberapa prasarana serta prasarana yang telah ada baik dari tingkat universitas hingga ke fakultas seperti *website SITAMPAN* yang memudahkan proses pelaksanaan program MBKM. Namun demikian untuk FISIP sendiri hingga saat ini masih belum tersedia ruang khusus MBKM FISIP untuk memudahkan koordinasi mahasiswa bersama dengan pihak pelaksana di fakultas.

Pada aspek disposisi belum berjalan dengan baik karena walaupun pembagian tugas dan tanggung jawab telah ada namun sikap pelaksana di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tadulako masih memiliki perbedaan terhadap sistem konversi SKS di tiap prodi. Kurangnya dukungan prodi membuat proses pelaksanaan program MBKM ini menjadi terhambat. Sehingga dalam hal ini, masih perlu dibuatkan sejenis buku panduan rekognisi atau sejenisnya sehingga kedepannya tidak ada lagi perbedaan standar akademik disetiap prodi.

Pada aspek struktur birokrasi, bisa dikatakan sudah baik hal ini didasarkan pada SOP (*Standar Operating Procedures*) yang telah ada dan kemudian menjadi rujukan di fakultas. Tidak hanya itu namun juga telah disediakan buku panduan dan juga petunjuk teknis dalam pelaksanaan program Merdeka Belajar Kampus Merdeka.

Berdasarkan Surat Keputusan Rektor Universitas Tadulako Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka dalam hal ini segala bentuk kegiatan program MBKM yang dilakukan mulai dari sosialisasi baik *offline* maupun *online* hingga bimbingan teknis yang bersama pihak pelaksana mulai dari tingkat universitas, fakultas, dan juga prodi dan juga pembentukan Duta Kampus Merdeka sebagai perpanjangan tangan dosen serta pihak MBKM FISIP, pembentukan pihak pelaksana ditiap fakultas.

Walaupun demikian, dalam proses sosialisasi hanya 3 jenis kegiatan program MBKM yang massif dilakukan bukan hanya di fakultas namun juga di Universitas Tadulako. Serta, dalam pelaksanaannya masih terdapat perbedaan kebijakan di tiap-tiap prodi terkait mekanisme konversi SKS yang dilakukan bahkan masih terdapat program studi yang belum menyiapkan pilihan matakuliah untuk program MBKM. Selain kendala yang dihadapi oleh program studi, permasalahan lainnya yaitu terkait pemahaman serta masih kurangnya informasi yang didapatkan oleh mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tadulako misalnya terkait siapa-siapa saja yang berhak memberikan nilai terhadap mahasiswa yang mengikuti program MBKM.

Berdasarkan hasil penelitian di lapangan bahwa hal tersebut yang dilakukan bersama dengan informan dan juga fakta empirik yang peneliti amati maka dapat disimpulkan bahwa tidak seluruhnya program studi di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tadulako mendukung penuh pelaksanaan program MBKM. Selain itu, hambatan yang masih didapatkan di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tadulako yaitu belum adanya standar penilaian akademik yang sama di setiap program studi, bahwa kurangnya minat dosen untuk ikut berpartisipasi dalam rapat koordinasi dan evaluasi yang dilakukan oleh pihak MBKM FISIP, serta sejauh ini keterlambatan penerbitan SK tetap pengurus MBKM FISIP yang belum ada.

SIMPULAN

Pelaksanaan Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tadulako bisa dikatakan sepenuhnya belum berjalan dengan baik, dikarenakan masih ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Jika dilihat dari beberapa aspek yang mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan belum terpenuhi sesuai teori yang dikemukakan oleh George C. Edward III yaitu komunikasi dan disposisi. Serta masih terdapat beberapa permasalahan dalam implementasinya yaitu kurangnya koordinasi yang dilakukan oleh para pihak pelaksana di tingkat fakultas serta kurangnya minat dosen-dosen dalam mengikuti pertemuan bersama pihak pelaksana ditingkat fakultas, belum tersedianya fasilitas pendukung lainnya seperti ruang MBKM FISIP untuk memudahkan mahasiswa dalam berkoordinasi bersama pihak pelaksana di fakultas serta kurangnya pengetahuan dan pemahaman dosen-dosen ditingkat fakultas terkait program MBKM, serta pada aspek disposisi masih diperlukannya sejenis buku panduan rekognisi terkait mekanisme konversi SKS sehingga kedepannya tidak ada lagi permasalahan terkait rekognisi mahasiswa hingga kegiatan selesai dilakukan oleh mahasiswa.

Adapun dalam hal ini yang menjadi saran dari peneliti terkait proses pelaksanaan Merdeka Belajar Kampus Merdeka di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tadulako ialah pihak pelaksana harus meningkatkan komunikasi pada aspek konsistensi pada pelaksanaan program MBKM di FISIP, perlu adanya ruang MBKM FISIP agar mahasiswa bisa berkoordinasi bersama pihak MBKM FISIP jika terdapat kendala dalam mengikuti program MBKM. Pihak pelaksana juga perlu meningkatkan kualitas sumber daya manusia dengan cara melakukan sosialisasi atau bimbingan teknis bersama dosen-dosen ditingkat fakultas dengan merujuk pada SOP dan juga buku panduan yang telah disediakan. Dan juga dukungan tiap prodi merupakan hal penting dalam hal ini untuk meningkatkan minat mahasiswa untuk mengikuti program MBKM karena dalam hal ini mahasiswa merupakan sasaran dalam pelaksanaan program MBKM. Selain itu pihak pelaksana juga diharapkan menyiapkan buku panduan rekognisi atau sejenisnya karena walaupun buku panduan pelaksanaan telah disediakan namun pemahaman dan pengetahuan pihak pelaksana ditingkat fakultas juga masih sangat kurang

terhadap pelaksanaan kebijakan MBKM, terlebih di tiap prodi masih memiliki perbedaan kebijakan terutama dalam mekanisme konversi SKS.

DAFTAR PUSTAKA

- Aan Komariah dan Djam'an Satori (2010). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung : Alfabeta, CV.
- Agustino, Leo. (2020). *Dasar-Dasar Kebijakan Publik Edisi Revisi Ke-2*. Bandung : Alfabeta, CV.
- Asiah, N. (2020). *Implementasi Kebijakan Merdeka Belajar-Kampus Merdeka* (studi pada fakultas ilmu sosial dan hukum universitas negeri makassar). *Angewandte Chemie International Edition*, 6(11), 951–952., 5–24.
- Keputusan Rektor Universitas Tadulako Nomor 5398/UN28/AK/2020 Tentang *Pelaksanaan Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka di Universitas Tadulako*
- Miles, Huberman, A.M & Saldana, J. (2014). *Qualitative Data Analysis, A Method Sourcebook*, Edition 3. USA: Sage Publications. Terjemahan Tjejep Rohindi Rohidi, UI-Press.
- Sevima. 2022. “ 5 payung hukum kebijakan kampus merdeka dan program yang ditawarkan”. Melalui [https://sevima.com/5-payung-hukum-kebijakan-kampus-merdeka-dan-program-yang -ditawarkan/](https://sevima.com/5-payung-hukum-kebijakan-kampus-merdeka-dan-program-yang-ditawarkan/)
- Sugiyono . (2016). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, Cetak ke-24. Bandung : Alfabeta, CV.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang *Sistem Pendidikan Nasional*.
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2003 Tentang *Standar Nasional Perguruan Tinggi* .
- Peraturan Rektor Universitas Tadulako Nomor 8 Tentang *Pelaksanaan Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka di Universitas Tadulako*.
- Viennet, R., & Pont, B. (2017). *Education policy implementation: A literature review and proposed framework*. 162.

TENTANG PENULIS

A. KETERANGAN DIRI

1. Nama : Fira Juniar
2. Tempat/Tanggal Lahir : Palu, 07 Juni 2000
3. Nomor Induk Mahasiswa : B101 20 155
4. Jenis Kelamin : Perempuan
5. Agama : Islam
6. Status Perkawinan : Belum Menikah
7. Alamat : Btn Palupi Griya Indah Sejahtera



B. KETERANGAN ORANG TUA

1. Nama Ayah : H. Ambo Iri
Tempat/Tanggal Lahir : Sengkang, 12 Februari 1950
Pekerjaan : Wiraswasta
2. Nama Ibu : Indo Jemma
Tempat/ Tanggal Lahir : Sengkang, 31 Desember 1960
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga

C. RIWAYAT PENDIDIKAN

1. 2006 - 2008 : SD IT Muhajirin Inpres Palu Barat
2. 2008 - 2012 : SDN Palupi
3. 2012 – 2015 : SMP Negeri 5 Palu
4. 2015 – 2018 : SMK Negeri 2 Palu
5. 2020 Terdaftar sebagai Mahasiswa Program Studi Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik